ISU-ISU GLOBAL KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

[1] Sri Widiyati, [2] Kasful Anwar Us, [3] Miftahur Rizik, [4] Suprihatin, [5] Tison Haryanto, [6]Ahmad Zaki

[1,2,3,4,5,6]*Institut Islam Ma'arif Jambi*
E-mail : [1]sriwidiati290625@gmail.com, [2]kasfulanwarus@uinjambi.ac.id, [3]Miftahurrizik12@gmail.com, [4]Suprihatin.atin.priha@gmail.com, [5]haryantotison@gmail.com, [6]zakijakarta@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Islam di era global menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan sosial, serta dinamika kebijakan pendidikan di tingkat nasional maupun internasional. Isu-isu global seperti digitalisasi pembelajaran, revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, peningkatan mutu pendidikan, penguatan moderasi beragama, pendidikan inklusif, keberlanjutan pembangunan (Sustainable Development Goals/SDGs), serta perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menuntut adanya kebijakan pendidikan Islam yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada penguatan karakter peserta didik. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis berbagai isu global yang memengaruhi kebijakan pendidikan Islam serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pengkajian berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta strategi pengembangan kebijakan pendidikan Islam di tengah perubahan global. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi abad ke-21, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta penguatan nilai-nilai keislaman yang moderat. Selain itu, integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai Islam menjadi kebutuhan strategis dalam membentuk generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, dan mampu bersaing secara global. Pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, orang tua, dan masyarakat perlu bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan identitas dan nilai-nilai pendidikan Islam. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus mempertahankan fungsi utamanya sebagai sarana pembentukan insan yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berdaya saing pada tingkat nasional maupun internasional.

Kata Kunci : *Isu Global, Kebijakan Pendidikan Islam, Globalisasi, Transformasi Digital, Moderasi Beragama.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Dalam konteks pendidikan Islam, proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan potensi peserta didik, penguatan nilai moral, serta pembentukan individu yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (Tilaar, 2019; Daulay, 2020). Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan sosial, kemampuan beradaptasi, dan daya saing di tengah perkembangan global (Muhaimin, 2019).

Perkembangan global pada abad ke-21 telah membawa perubahan yang sangat cepat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI), serta perubahan kebutuhan dunia kerja telah mendorong lembaga pendidikan untuk melakukan pembaruan dalam sistem pembelajaran dan pengelolaan pendidikan (Schwab, 2017; UNESCO, 2021). Pendidikan Islam dituntut untuk mampu merespons perubahan tersebut melalui kebijakan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan mutu (Azzumardi Azra, 2019). Digitalisasi pendidikan memberikan peluang untuk memperluas akses belajar, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta mengembangkan kompetensi digital peserta didik dan pendidik. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, dan perbedaan kesiapan antar lembaga pendidikan (UNESCO, 2023; Kemendikbudristek, 2022).

Selain transformasi digital, isu global yang turut memengaruhi kebijakan pendidikan Islam adalah peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses, pendidikan inklusif, pengembangan kompetensi abad ke-21, keberagaman sosial dan budaya, serta pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) (United Nations, 2015). Kebijakan pendidikan Islam perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi digital sebagai kompetensi utama abad ke-21 (Partnership for 21st Century Learning, 2019). Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik mampu menghadapi perubahan global tanpa kehilangan identitas, karakter, dan nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam (Hefner, 2020).

Perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam penyebaran informasi keagamaan. Kemudahan memperoleh informasi melalui internet dan media sosial tidak selalu diikuti dengan kemampuan untuk menilai kebenaran, kredibilitas, dan relevansi informasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pola pikir dan sikap peserta didik terhadap perbedaan serta meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak valid (UNESCO, 2023). Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan Islam perlu memperkuat literasi digital, etika penggunaan teknologi, kemampuan berpikir kritis, serta pengembangan sikap moderat, toleran, dan inklusif (Kementerian Agama RI, 2022). Penguatan moderasi beragama menjadi salah satu isu penting dalam pendidikan Islam karena berkaitan dengan upaya membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk (Kementerian Agama RI, 2022).

Di Indonesia, kebijakan pendidikan Islam terus mengalami perkembangan sebagai respons terhadap perubahan sosial dan tuntutan global. Implementasi Kurikulum Merdeka, transformasi

digital madrasah, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan moderasi beragama, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran merupakan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam (Kemendikbudristek, 2022; Kementerian Agama RI, 2022). Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan masyarakat, pendanaan, serta efektivitas pelaksanaan dan evaluasi kebijakan (Mulyasa, 2023).

Kebijakan pendidikan Islam pada era global perlu dirancang secara responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, karakteristik peserta didik, serta konteks sosial dan budaya. Kebijakan yang adaptif dapat membantu lembaga pendidikan Islam meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, memperkuat kompetensi pendidik, dan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan global (Banks, 2020; OECD, 2023). Sebaliknya, kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lembaga pendidikan dapat menimbulkan kesenjangan dalam implementasi serta menghambat peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai isu-isu global dalam kebijakan pendidikan Islam menjadi penting untuk memahami berbagai perubahan, tantangan, peluang, dan arah pengembangan pendidikan Islam pada masa kini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi global, karakter yang kuat, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman (UNESCO, 2021; OECD, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **studi kepustakaan (*library research*)** dengan pendekatan **deskriptif kualitatif**. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian, analisis, dan sintesis berbagai teori, konsep, hasil penelitian, serta kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu global dalam kebijakan pendidikan Islam (Zed, 2018). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai fenomena, tantangan, dan perkembangan kebijakan pendidikan Islam dalam menghadapi dinamika global.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, regulasi Kementerian Agama Republik Indonesia, dokumen UNESCO, serta laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengenai pendidikan global. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, serta hasil penelitian yang relevan dengan isu global, transformasi digital, pendidikan Islam, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), pendidikan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2021; OECD, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi**, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengkaji, dan mengorganisasi berbagai sumber pustaka yang memiliki relevansi dengan topik penelitian (Sugiyono, 2023). Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas sumber, relevansi terhadap fokus penelitian, serta kebaruan publikasi sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan isu-isu global dalam kebijakan pendidikan Islam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan **analisis isi (*content analysis*)**. Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Proses analisis difokuskan pada identifikasi berbagai isu global yang memengaruhi kebijakan pendidikan Islam, faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan, tantangan implementasi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan global.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu. Melalui triangulasi tersebut diharapkan hasil kajian memiliki tingkat validitas yang lebih baik serta mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai isu-isu global dalam kebijakan pendidikan Islam (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Isu Global dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan global telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan pendidikan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Globalisasi telah mempercepat arus informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, mobilitas masyarakat, serta integrasi ekonomi dan budaya yang berdampak pada perubahan sistem pendidikan. Pendidikan Islam tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi global, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta memiliki karakter yang kuat (UNESCO, 2021; OECD, 2023). Kebijakan pendidikan Islam saat ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kompetensi abad ke-21, yaitu berpikir kritis (*critical thinking*), kreativitas (*creativity*), komunikasi (*communication*), dan kolaborasi (*collaboration*). Selain itu, kebijakan juga mendorong penguasaan literasi digital, literasi informasi, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dalam proses pembelajaran (Partnership for 21st Century Learning, 2019).

Isu-Isu Global dalam Kebijakan Pendidikan Islam (Pendekatan 5W+1H)

Apa (What)?

Isu-isu global dalam kebijakan pendidikan Islam adalah berbagai permasalahan, tantangan, dan perkembangan yang terjadi pada tingkat internasional yang memengaruhi arah, pelaksanaan, dan pengembangan kebijakan pendidikan Islam. Isu-isu tersebut meliputi globalisasi pendidikan, transformasi digital, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI), kompetensi abad ke-21, pendidikan inklusif, moderasi beragama, pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), internasionalisasi pendidikan, serta perubahan kebutuhan dunia kerja (UNESCO, 2021; OECD, 2023).

Di Mana (Where)?

Isu-isu global tersebut terjadi di hampir seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia, pengaruhnya terlihat pada lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta berbagai lembaga pendidikan melakukan penyesuaian kebijakan untuk menjawab tantangan global, seperti

transformasi digital, penguatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, dan peningkatan mutu pendidikan Islam (Kementerian Agama RI, 2022).

Kapan (When)?

Isu-isu global dalam pendidikan mulai berkembang pesat sejak era globalisasi pada akhir abad ke-20 dan semakin kuat memasuki abad ke-21. Perkembangannya semakin cepat setelah Revolusi Industri 4.0 sekitar tahun 2011, disusul konsep Society 5.0 pada tahun 2016, serta percepatan digitalisasi pendidikan selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2022. Memasuki era pascapandemi hingga saat ini, perkembangan AI, pembelajaran digital, dan kerja sama pendidikan internasional menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan di berbagai negara (UNESCO, 2023).

Mengapa (Why)?

Isu-isu global menjadi perhatian karena perkembangan dunia telah mengubah kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Dunia kerja membutuhkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan keagamaan, tetapi juga kompetensi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Selain itu, kemajuan teknologi, arus informasi yang sangat cepat, perubahan sosial, dan meningkatnya persaingan global menuntut kebijakan pendidikan Islam untuk terus melakukan pembaruan agar tetap relevan, berkualitas, dan mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing (OECD, 2023; World Economic Forum, 2025).

Bagaimana (How)?

Kebijakan pendidikan Islam merespons isu-isu global melalui berbagai strategi, antara lain:

1. Mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan literasi digital, pembelajaran berbasis teknologi, dan pengembangan profesional berkelanjutan.
3. Memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk mendukung proses pembelajaran, asesmen, serta administrasi pendidikan.
4. Mengintegrasikan penguatan karakter, moderasi beragama, dan etika digital ke dalam kegiatan pembelajaran.
5. Memperluas akses pendidikan melalui pembelajaran daring dan penyediaan sarana teknologi.
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia.
7. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan global dan kebutuhan peserta didik (Kemendikbudristek, 2022; UNESCO, 2023).

KESIMPULAN

Melalui pendekatan 5W+1H dapat dipahami bahwa isu-isu global dalam kebijakan pendidikan Islam merupakan fenomena yang terjadi secara internasional, berkembang pesat pada era globalisasi dan transformasi digital, serta memengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Isu-isu tersebut muncul sebagai respons terhadap perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat global. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus dirancang secara adaptif, inovatif, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan mutu pendidikan, menghasilkan lulusan

yang kompeten, serta tetap mempertahankan nilai-nilai dasar pendidikan Islam di tengah perubahan dunia.

Transformasi Digital dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)

Transformasi digital menjadi salah satu isu global yang paling berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan Islam. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pembelajaran dari sistem konvensional menuju pembelajaran berbasis digital. Berbagai platform pembelajaran daring, perpustakaan digital, *Learning Management System* (LMS), hingga penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar (UNESCO, 2023).

Di lingkungan pendidikan Islam, pemanfaatan teknologi digital memberikan berbagai manfaat, antara lain memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, mempermudah evaluasi, serta memperkaya sumber belajar. AI juga dapat dimanfaatkan untuk penyusunan materi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, personalisasi pembelajaran, dan pengembangan media pembelajaran interaktif.

Namun demikian, implementasi teknologi digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan akses internet, keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kompetensi digital pendidik, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi di lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada peningkatan literasi digital guru, penyediaan infrastruktur teknologi, serta penyusunan regulasi mengenai penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab (Kemendikbudristek, 2022; UNESCO, 2023).

Transformasi Digital dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)

Transformasi digital merupakan salah satu isu global yang paling berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan Islam pada abad ke-21. Transformasi digital adalah proses perubahan sistem pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, efektivitas pengelolaan pendidikan, serta akses terhadap sumber belajar (UNESCO, 2023). Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga mengubah paradigma pembelajaran dari yang berpusat pada guru (*teacher centered learning*) menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered learning*).

Perkembangan teknologi digital semakin pesat sejak hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi internet, komputasi awan (*cloud computing*), *big data*, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI). Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan lembaga pendidikan Islam untuk melakukan berbagai penyesuaian kebijakan agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi digital dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional (Schwab, 2017).

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer melakukan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali pola, memahami bahasa, menganalisis data, menghasilkan konten, serta memberikan rekomendasi berdasarkan data yang tersedia (OECD, 2023). Dalam dunia pendidikan, AI telah dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan materi ajar, pembuatan soal evaluasi, analisis hasil belajar, pembelajaran adaptif (*adaptive learning*), penerjemahan bahasa, hingga pemberian umpan balik secara otomatis kepada peserta didik.

Dalam konteks pendidikan Islam, pemanfaatan AI memberikan berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dapat menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menyusun perangkat pembelajaran, merancang media pembelajaran yang lebih menarik, mengembangkan evaluasi berbasis digital, serta menyediakan pengalaman belajar yang lebih

personal sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selain itu, peserta didik memperoleh akses yang lebih luas terhadap literatur keislaman, jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan berbagai sumber belajar lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran secara mandiri (UNESCO, 2023).

Namun demikian, penggunaan AI dalam pendidikan Islam tidak dapat menggantikan peran guru sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan. AI hanya berfungsi sebagai teknologi pendukung (*supporting technology*), sedangkan proses pembentukan karakter, penanaman nilai, pembinaan akhlak, dan pengembangan aspek sosial-emosional tetap memerlukan interaksi langsung antara guru dan peserta didik (Luckin, 2018). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu menempatkan AI sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran tanpa mengurangi peran utama pendidik. Di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Kesenjangan akses internet, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital pendidik dan peserta didik, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi di lembaga pendidikan Islam masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan digital. Selain itu, penggunaan AI menimbulkan persoalan etika, seperti risiko plagiarisme, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi yang tidak akurat, serta ketergantungan peserta didik terhadap teknologi (UNESCO, 2023). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada penguatan kompetensi digital guru dan peserta didik melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, penyusunan pedoman penggunaan AI secara etis, serta integrasi literasi digital dalam kurikulum. Kebijakan tersebut juga harus memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tetap mendukung tujuan utama pendidikan Islam, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual, membentuk karakter, serta menanamkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial kepada peserta didik (Kemendikbudristek, 2022).

Dengan demikian, transformasi digital dan pemanfaatan Artificial Intelligence merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kebijakan pendidikan Islam. Apabila dikelola secara tepat melalui kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada nilai-nilai pendidikan Islam, teknologi digital dan AI dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran, memperluas akses pendidikan, serta mempersiapkan generasi yang memiliki kompetensi digital, berpikir kritis, kreatif, dan mampu menghadapi dinamika perkembangan global (OECD, 2023).

Penguatan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa meningkatnya arus globalisasi dan perkembangan media digital membawa dampak terhadap cara peserta didik memperoleh informasi keagamaan. Informasi yang diperoleh melalui media sosial sering kali tidak disertai proses verifikasi sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, intoleransi, bahkan penyebaran paham keagamaan yang ekstrem.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, penguatan moderasi beragama menjadi salah satu kebijakan strategis dalam pendidikan Islam di Indonesia. Moderasi beragama bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki sikap toleran, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi persatuan, serta mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk (Kementerian Agama RI, 2022). Implementasi moderasi beragama dilakukan melalui integrasi nilai-nilai toleransi dalam kurikulum, penguatan pendidikan karakter, pembelajaran kontekstual, serta pembiasaan sikap saling menghormati di lingkungan sekolah.

Penguatan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam

Penguatan moderasi beragama merupakan salah satu kebijakan strategis dalam pendidikan Islam untuk membentuk peserta didik yang memiliki sikap beragama secara seimbang, toleran, menghargai perbedaan, serta mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Moderasi beragama tidak berarti mengurangi ajaran agama, melainkan mengamalkan ajaran agama

secara proporsional tanpa bersikap ekstrem, baik ekstrem dalam pemahaman maupun dalam tindakan (Kementerian Agama RI, 2022).

Bagaimana Penguatan Moderasi Beragama Dilaksanakan?

Penguatan moderasi beragama dalam pendidikan Islam dilakukan melalui berbagai kebijakan dan praktik pembelajaran. Pertama, nilai-nilai moderasi diintegrasikan ke dalam kurikulum dan materi pembelajaran sehingga peserta didik tidak hanya mempelajari aspek ibadah dan akidah, tetapi juga memahami pentingnya toleransi, keadilan, penghormatan terhadap keberagaman, dan tanggung jawab sebagai warga negara (Kementerian Agama RI, 2022).

Kedua, pendidik menerapkan metode pembelajaran yang mendorong dialog, diskusi, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah secara damai. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik dilatih untuk menghargai perbedaan pendapat, mengemukakan argumentasi secara santun, serta menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (Banks, 2020).

Ketiga, budaya sekolah dikembangkan agar mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama melalui pembiasaan sikap saling menghormati, kerja sama, disiplin, kepedulian sosial, dan anti-diskriminasi. Selain itu, sekolah dapat melibatkan orang tua dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang memperkuat kerukunan dan persatuan sehingga nilai moderasi tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (UNESCO, 2021).

Mengapa Penguatan Moderasi Beragama Penting?

Penguatan moderasi beragama menjadi penting karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Dalam kondisi tersebut, pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membentuk peserta didik yang mampu menghargai perbedaan dan menjaga keharmonisan sosial. Tanpa pemahaman yang moderat, peserta didik berpotensi terpengaruh oleh paham ekstrem, intoleransi, ujaran kebencian, maupun informasi keagamaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terutama melalui media digital (UNESCO, 2023).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan peserta didik memperoleh berbagai informasi keagamaan dari media sosial dan internet. Informasi tersebut tidak selalu berasal dari sumber yang kredibel sehingga dapat memengaruhi cara berpikir dan bersikap. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan etika bermedia agar mampu menyaring informasi secara bijaksana (OECD, 2023).

Penguatan moderasi beragama juga mendukung tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan warga negara yang berkarakter, demokratis, bertanggung jawab, serta mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami ajaran agama, tetapi juga memiliki kemampuan membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa.

Contoh Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam

Beberapa contoh penerapan moderasi beragama di lingkungan pendidikan Islam antara lain:

1. **Integrasi dalam pembelajaran**, misalnya guru Pendidikan Agama Islam mengaitkan materi akhlak dengan pentingnya menghormati teman yang berbeda agama, suku, maupun budaya.
2. **Kegiatan proyek kolaboratif**, yaitu peserta didik bekerja sama dalam kegiatan bakti sosial, penghijauan lingkungan, atau aksi kemanusiaan tanpa membedakan latar belakang agama dan budaya.

3. **Pembiasaan budaya sekolah**, seperti membiasakan sikap saling menghormati, tidak melakukan perundungan (*bullying*), menjaga sopan santun dalam berdiskusi, dan menyelesaikan konflik melalui musyawarah.
4. **Literasi digital**, yaitu guru mengajarkan cara memverifikasi informasi keagamaan yang diperoleh dari internet, mengenali hoaks, serta menggunakan media sosial secara etis dan bertanggung jawab.
5. **Dialog lintas budaya dan keberagaman**, misalnya sekolah mengadakan seminar, diskusi, atau kegiatan yang memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia sehingga peserta didik memahami pentingnya toleransi dan persatuan.
6. **Keteladanan pendidik**, yaitu guru menunjukkan sikap adil, menghargai seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, serta menjadi contoh dalam berkomunikasi secara santun dan menghormati perbedaan.

Analisis

Hasil berbagai kajian menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama melalui pendidikan mampu meningkatkan sikap toleransi, mengurangi potensi konflik sosial, memperkuat karakter peserta didik, dan membangun budaya sekolah yang inklusif. Namun, keberhasilannya bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, kompetensi pendidik, dukungan keluarga, serta lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan Islam agar mampu membentuk generasi yang religius, terbuka, menghargai keberagaman, serta siap menghadapi tantangan masyarakat global (Kementerian Agama RI, 2022; UNESCO, 2021).

Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Akses Pendidikan

Salah satu isu global yang menjadi perhatian dunia adalah pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Prinsip pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, maupun kondisi fisik (UNESCO, 2021).

Dalam pendidikan Islam, penerapan pendidikan inklusif diwujudkan melalui penyediaan layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan inklusif mendorong lembaga pendidikan Islam untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, aman, dan menghargai keberagaman. Tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan guru yang memiliki kompetensi pendidikan inklusif, kurangnya fasilitas pendukung, serta belum meratanya implementasi kebijakan di berbagai daerah (OECD, 2023).

Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Akses Pendidikan

Pendidikan inklusif dan pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu isu global yang menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan Islam. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, budaya, agama, jenis kelamin, maupun latar belakang lainnya (UNESCO, 2021). Sementara itu, pemerataan akses pendidikan merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang adil dalam memperoleh pendidikan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, termasuk daerah terpencil dan tertinggal.

Bagaimana Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Akses Dilaksanakan?

Dalam kebijakan pendidikan Islam, pendidikan inklusif dilaksanakan melalui penyelenggaraan layanan pendidikan yang terbuka bagi semua peserta didik. Lembaga pendidikan

Islam, seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, dan perguruan tinggi Islam, didorong untuk menyediakan lingkungan belajar yang ramah, aman, dan menghargai keberagaman. Hal ini diwujudkan melalui penyesuaian kurikulum, penggunaan metode pembelajaran yang fleksibel, penyediaan fasilitas pendukung, serta peningkatan kompetensi guru dalam melayani peserta didik dengan kebutuhan yang beragam (UNESCO, 2021).

Pemerataan akses pendidikan dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, penyediaan bantuan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, digitalisasi pembelajaran, serta pemerataan distribusi tenaga pendidik. Pemerintah juga mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi agar peserta didik di daerah terpencil tetap memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas (Kemendikbudristek, 2022).

Mengapa Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Akses Penting?

Pendidikan inklusif penting karena setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa mengalami diskriminasi. Keberagaman kemampuan, kondisi sosial, ekonomi, maupun budaya tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengembangkan potensinya. Pendidikan yang inklusif memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk belajar bersama, saling menghargai perbedaan, dan membangun sikap toleransi sejak usia dini (Banks, 2020).

Pemerataan akses pendidikan juga menjadi prioritas karena masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Keterbatasan fasilitas, akses internet, jumlah tenaga pendidik, serta kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan sebagian peserta didik belum memperoleh layanan pendidikan yang optimal. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus mampu mengurangi kesenjangan tersebut agar setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas (OECD, 2023).

Selain itu, pemerataan akses pendidikan merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya Tujuan 4 yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua (United Nations, 2015). Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya keadilan sosial melalui penyelenggaraan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Contoh Implementasi Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Akses

Beberapa contoh implementasi pendidikan inklusif dan pemerataan akses dalam pendidikan Islam antara lain:

1. **Madrasah inklusif**, yaitu madrasah yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan menyediakan layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka melalui penyesuaian metode, media, dan asesmen.
2. **Program beasiswa pendidikan**, seperti bantuan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan di madrasah atau sekolah Islam.
3. **Digitalisasi pembelajaran**, yaitu pemanfaatan platform pembelajaran daring, kelas virtual, dan perpustakaan digital sehingga peserta didik di daerah yang sulit dijangkau tetap dapat mengakses materi pembelajaran.
4. **Pelatihan guru**, yaitu peningkatan kompetensi pendidik dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, memahami karakteristik peserta didik yang beragam, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

5. **Penyediaan fasilitas ramah disabilitas**, seperti jalur kursi roda, ruang belajar yang mudah diakses, media pembelajaran adaptif, dan alat bantu belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
6. **Kemitraan dengan masyarakat dan lembaga sosial**, misalnya kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga filantropi dalam penyediaan sarana pendidikan, bantuan biaya pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat.

Analisis

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif dan pemerataan akses pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi sekolah, pengurangan kesenjangan pendidikan, serta penguatan nilai-nilai keadilan dan penghargaan terhadap keberagaman. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya guru yang memiliki kompetensi pendidikan inklusif, belum meratanya sarana dan prasarana, serta kesenjangan akses teknologi di beberapa wilayah (UNESCO, 2021; OECD, 2023).

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu terus memperkuat penyediaan layanan pendidikan yang inklusif melalui peningkatan kualitas guru, pemerataan infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, pendidikan Islam dapat memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Pendidikan Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda **Sustainable Development Goals (SDGs)** memberikan arah baru bagi kebijakan pendidikan di berbagai negara. Tujuan keempat SDGs (*Quality Education*) menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, berkualitas, serta memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat (United Nations, 2015).

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut melalui pengembangan karakter, peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, dan pembentukan masyarakat yang berkelanjutan. Nilai-nilai keadilan, kepedulian sosial, tanggung jawab, serta pelestarian lingkungan dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kesadaran untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan Islam dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. Agenda ini terdiri atas 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan, perlindungan lingkungan, dan kemitraan global (United Nations, 2015). Dalam konteks pendidikan, SDGs menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan melalui Tujuan 4 (*Quality Education*), yaitu menjamin pendidikan yang inklusif, adil, berkualitas, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

Bagaimana Pendidikan Islam Mendukung SDGs?

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Implementasi SDGs dalam pendidikan Islam dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang

mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan, pendidikan karakter, literasi lingkungan, literasi digital, serta pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) (UNESCO, 2021).

Selain itu, kebijakan pendidikan Islam mendorong peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi digital, penyediaan akses pendidikan yang merata, serta peningkatan mutu tata kelola lembaga pendidikan. Pendidikan Islam juga berperan dalam membentuk peserta didik yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (OECD, 2023).

Implementasi SDGs dalam pendidikan Islam juga diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), pengabdian kepada masyarakat, program sekolah ramah lingkungan, serta pengembangan budaya sekolah yang mendukung perilaku hidup bersih, hemat energi, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengapa SDGs Penting bagi Pendidikan Islam?

Penerapan SDGs menjadi penting karena tantangan global yang dihadapi saat ini semakin kompleks, seperti perubahan iklim, krisis lingkungan, kesenjangan pendidikan, kemiskinan, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan tersebut melalui penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan abad ke-21, serta penguatan karakter dan tanggung jawab sosial (UNESCO, 2021).

Selain itu, SDGs mendorong lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga pengembangan akhlak, kepedulian sosial, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs, pendidikan Islam dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi global sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan dunia (United Nations, 2015).

Contoh Implementasi SDGs dalam Pendidikan Islam

Beberapa contoh implementasi SDGs dalam kebijakan dan praktik pendidikan Islam antara lain:

1. **Peningkatan kualitas pembelajaran**, melalui penerapan pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis proyek, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2. **Program sekolah ramah lingkungan (*green school*)**, seperti kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan penghematan energi di lingkungan madrasah atau sekolah Islam.
3. **Pemerataan akses pendidikan**, melalui pemberian beasiswa, bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta penyelenggaraan pembelajaran daring untuk menjangkau daerah terpencil.
4. **Penguatan pendidikan karakter dan kepedulian sosial**, melalui kegiatan bakti sosial, penggalangan dana kemanusiaan, program zakat, infak, sedekah, dan kegiatan sukarela yang melibatkan peserta didik.
5. **Peningkatan kompetensi guru**, melalui pelatihan literasi digital, pembelajaran inovatif, dan pengembangan profesional berkelanjutan agar mampu menghadapi perubahan global.

6. **Kemitraan dengan berbagai pihak**, seperti pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional dalam pengembangan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan SDGs.

Analisis

Hasil berbagai kajian menunjukkan bahwa integrasi SDGs dalam pendidikan Islam memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, penguatan karakter peserta didik, peningkatan kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21 (UNESCO, 2021; OECD, 2023). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pendanaan, belum meratanya pemahaman mengenai SDGs di kalangan pendidik, kesenjangan infrastruktur teknologi, serta perlunya penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu terus mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, tata kelola lembaga pendidikan, dan program pengabdian masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan abad ke-21, kepedulian terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial, serta kemampuan berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Berdasarkan hasil kajian, implementasi kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Belum meratanya kualitas pendidikan Islam antarwilayah.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi.
3. Rendahnya kompetensi digital sebagian pendidik.
4. Kesenjangan akses internet, terutama di daerah terpencil.
5. Terbatasnya anggaran untuk transformasi digital.
6. Belum optimalnya pelatihan guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran.
7. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia industri.
8. Perubahan kebutuhan dunia kerja yang berlangsung sangat cepat.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, partisipasi masyarakat, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan (Mulyasa, 2023).

Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Implementasi kebijakan pendidikan Islam merupakan proses penerapan berbagai regulasi, program, dan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Meskipun berbagai kebijakan telah dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Tantangan tersebut berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, perkembangan teknologi, keterbatasan sarana dan prasarana, perubahan kebutuhan masyarakat, serta dinamika global yang terus berkembang (Mulyasa, 2023).

Bagaimana Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam?

Pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam belum sepenuhnya berjalan optimal karena terdapat perbedaan kondisi antarwilayah dan antarlembaga pendidikan. Sebagian madrasah, pesantren, dan sekolah Islam telah mampu mengadopsi inovasi pembelajaran berbasis digital, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan akses internet, perangkat teknologi, dan sumber daya

manusia yang kompeten. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan sering kali tidak merata sehingga kualitas layanan pendidikan juga berbeda-beda (Kemendikbudristek, 2022).

Selain itu, perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang berlangsung secara dinamis menuntut pendidik untuk terus meningkatkan kompetensinya. Namun, tidak semua guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan, sehingga kemampuan dalam menerapkan kurikulum baru, pembelajaran diferensiasi, pemanfaatan teknologi digital, maupun penggunaan Artificial Intelligence (AI) masih beragam (OECD, 2023).

Tantangan lainnya adalah meningkatnya pengaruh globalisasi dan perkembangan media digital. Peserta didik kini memperoleh informasi dari berbagai sumber di internet yang belum tentu benar atau sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memperkuat literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan pendidikan karakter agar peserta didik mampu menyaring informasi secara bijaksana (UNESCO, 2023).

Mengapa Tantangan Ini Terjadi?

Beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pendidikan Islam belum optimal antara lain:

1. **Kesenjangan kualitas sumber daya manusia**, terutama dalam kompetensi pedagogik, profesional, digital, dan kepemimpinan pendidikan.
2. **Keterbatasan sarana dan prasarana**, seperti akses internet, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran digital, serta perangkat teknologi yang belum tersedia secara merata.
3. **Keterbatasan pendanaan**, khususnya pada lembaga pendidikan Islam swasta atau yang berada di daerah terpencil, sehingga menghambat pengembangan fasilitas dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
4. **Perubahan teknologi yang sangat cepat**, sehingga kebijakan pendidikan harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
5. **Belum optimalnya kolaborasi** antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan.
6. **Perbedaan kondisi geografis dan sosial ekonomi**, yang menyebabkan akses terhadap pendidikan berkualitas masih belum merata di berbagai daerah.

Contoh Tantangan Implementasi

Beberapa contoh tantangan yang masih sering dijumpai dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam antara lain:

- Masih terdapat madrasah di daerah terpencil yang mengalami keterbatasan akses internet sehingga pembelajaran digital belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- Sebagian guru belum menguasai penggunaan platform pembelajaran digital, *Learning Management System* (LMS), maupun aplikasi berbasis Artificial Intelligence untuk mendukung proses pembelajaran.
- Implementasi Kurikulum Merdeka belum berjalan secara merata karena perbedaan kesiapan sekolah, ketersediaan sumber belajar, dan kemampuan pendidik.
- Masih ditemukan peserta didik yang memiliki literasi digital rendah sehingga mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat, hoaks, maupun konten yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan Islam.
- Keterbatasan fasilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus menyebabkan penerapan pendidikan inklusif di sebagian lembaga pendidikan Islam belum optimal.

Upaya Mengatasi Tantangan

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan Islam, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan mengenai pedagogi, teknologi digital, pembelajaran inovatif, dan pemanfaatan AI.
2. Memperluas pemerataan infrastruktur pendidikan, terutama akses internet, perangkat teknologi, dan fasilitas pembelajaran di daerah tertinggal.
3. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan.
4. Mengembangkan sistem evaluasi dan monitoring kebijakan secara berkala agar implementasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
5. Mengintegrasikan literasi digital, pendidikan karakter, moderasi beragama, dan keterampilan abad ke-21 ke dalam kurikulum agar peserta didik mampu menghadapi tantangan global secara bertanggung jawab.

Analisis

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor kepemimpinan, kompetensi pendidik, dukungan sarana dan prasarana, pendanaan, serta partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan (Mulyasa, 2023; OECD, 2023). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu dirancang secara adaptif, berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta didukung oleh evaluasi yang berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan global tanpa mengabaikan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk peserta didik yang berilmu, berkarakter, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Strategi Penguatan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Global

Untuk menghadapi berbagai isu global tersebut, diperlukan strategi penguatan kebijakan pendidikan Islam yang komprehensif. Beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan literasi digital, pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan abad ke-21, pemanfaatan teknologi digital dan AI secara etis, peningkatan kualitas tata kelola lembaga pendidikan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat (OECD, 2023).

Selain itu, kebijakan pendidikan Islam perlu memperkuat integrasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kompetensi akademik, keterampilan profesional, karakter, dan tanggung jawab sosial. Dengan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan, pendidikan Islam diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing internasional, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Isu-isu global telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan pendidikan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Globalisasi, transformasi digital, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), penguatan moderasi beragama, pendidikan inklusif, pemerataan akses pendidikan, implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta perubahan kebutuhan dunia kerja menuntut pendidikan Islam untuk terus beradaptasi dengan

perkembangan zaman. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, penguatan kompetensi abad ke-21, pengembangan literasi digital, serta pembentukan karakter peserta didik yang mampu menghadapi tantangan global.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam telah menunjukkan berbagai kemajuan, seperti pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum yang lebih adaptif, penguatan moderasi beragama, serta perluasan akses pendidikan yang lebih inklusif. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesenjangan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya literasi digital, ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, serta perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu dirancang secara adaptif, inovatif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai-nilai pendidikan Islam. Penguatan kompetensi pendidik, pemerataan infrastruktur pendidikan, pemanfaatan teknologi digital dan AI secara etis, serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan abad ke-21, karakter yang kuat, literasi digital, tanggung jawab sosial, serta daya saing di tingkat nasional maupun global tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasar pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Asrori, A. (2025). Transformasi pembelajaran pendidikan agama Islam melalui media interaktif berbasis kecerdasan buatan di era digital. *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science, 5*(1). https://doi.org/10.53754/civilofficium.v5i1.765

Andrini, Y. D., Ruminingsih, E. S., Hidayah, S. N., & Hakim, A. (2025). Transformasi pendidikan Islam di era AI: Reorientasi tujuan belajar dari kecerdasan digital menuju kecerdasan spiritual. *Jurnal Inovasi Pendidikan*.

Tim Penulis. (2025). Inovasi pendidikan moderasi beragama berbasis digital di era Revolusi Industri 5.0. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8*(11), 12627–12634. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9631

Banks, J. A. (2020). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. 3rd ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Daulay, H. P. (2020). *Pendidikan Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya*. Jakarta: Kencana.

Hoeruman, M. R., Kuswanto, R. T., Subha, R., Dewi, A. F., & Khoirunnisa. (2025). Transformasi pendidikan agama Islam menuju era digital dan *Artificial Intelligence*. *Muaddib: Islamic Education Journal, 7*(2). https://doi.org/10.19109/muaddib.v7i2.28200

Hefner, R. W. (2020). *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Kurikulum Merdeka: Buku Saku Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. London: UCL Institute of Education Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Muhaimin. (2019). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mulyasa, E. (2023). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

OECD. (2023). *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.

Partnership for 21st Century Learning. (2019). *Framework for 21st Century Learning*. Washington, DC: P21.

Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. New York, NY: Crown Business.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.

Tilaar, H. A. R. (2019). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms?* Paris: UNESCO.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York, NY: United Nations.

World Economic Forum. (2025). *The Future of Jobs Report 2025*. Geneva: World Economic Forum.

Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zahra, D. N. (2025). Transformasi pendidikan Islam berbasis teknologi *Artificial Intelligence* dalam membangun karakter moderat dan kompetensi global peserta didik masa kini. *JISEI: Journal of Islamic Studies and Educational Innovation, 2*(1). https://doi.org/10.61094/jisei.v2i1.150